Stabilisasi Politik, Ekonomi, dan Sosial Masa Orde Baru

1. Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan

   Susunan Kabinet Pembangunan diumumkan oleh Presiden Soeharto pada 6 Juni 1967 dan dilantik pada 14 Oktober 1967.

   Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Orde Baru menerapkan prinsip "Ekonomi sebagai Panglima", yaitu pembangunan ekonomi dijadikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah membentuk Kabinet Pembangunan untuk menciptakan stabilitas nasional.

   Beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru adalah:

   a. Kebijakan Fusi Partai

      Kebijakan fusi partai menghasilkan tiga partai baru sebagai berikut:

      1. Partai yang berlatar belakang Islam, seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
      2. Partai yang mengusung ideologi nasionalis dan partai-partai non-Islam, seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI disatukan dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
      3. Golongan Karya (Golkar).

   b. Pelaksanaan Pemilihan Umum

      Pemilihan umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada 1955. Dalam pelaksanaannya, pemilu pada masa Orde Baru diselenggarakan selama enam kali, yaitu pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dinamika pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru dapat kamu amati berikut:

Pemilu 1971

Diselenggarakan pada 5 Juli 1971 dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu. Diikuti oleh sembilan partai politik dan satu organisasi golongan. Dalam pemilu ini tokoh partai peserta pemilu yang masih aktif dalam pemerintahan dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPR dalam partainya.

Pemilu 1977

Diselenggarakan pada 2 Mei 1977 dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini berisi tentang penyederhanaan partai peserta pemilu 1977. Sejak pemilu 1977, pemilu pada masa Orde Baru hanya diikuti oleh dua partai politik dan satu golongan karya.

Pemilu 1982

Diselenggarakan pada 4 Mei 1982 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti pada pemilu 1971 dan pemilu 1977, yaitu mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan.

Pemilu 1987

Diselenggarakan pada 23 April 1987 dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Ditandai dengan perubahan jumlah anggota DPR yang dipilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Undang-undang tersebut mengatur tentang perubahan jumlah anggota DPR sebanyak 400 orang dan 100 orang diangkat dari anggota ABRI.

Pemilu 1992

Diselenggarakan pada 6 Juni 1992 dan masih berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum. Terdapat perubahan yaitu bagi calon anggota DPR diperiksa secara khusus melalui penelitian khusus. Cara pembagian kursi masih tetap sama dengan pemilu sebelumnya.

Pemilu 1997

Diselenggarakan pada 29 Mei 1997 dan merupakan pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Pelaksanaan pemilu masih berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Perubahan ditandai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 untuk mengurangi kritik terhadap ABRI yang dianggap represif. Pemilu 1997 diwarnai berbagai protes di beberapa daerah yang dipicu oleh kecurangan dalam penghitungan suara.

Tokoh yang mengisi jabatan wakil presiden pada masa Orde Baru secara berurutan, yaitu:

1. Sultan Hamengku Buwono IX (1973–1978)
2. Adam Malik (1978–1983)
3. Umar Wirahadikusumah (1983–1988)
4. Sudharmono (1988–1993)
5. Try Sutrisno (1993–1998)
6. B.J. Habibie (1998)



Gambar 3.5 Wakil Presiden masa Orde Baru
Sumber: Widya Lestari Ningsih, Kompas (2023)

c. Penerapan Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI memberi militer peran ganda, tidak hanya sebagai lembaga pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang ikut menentukan haluan negara dan mendominasi pemerintahan Orde Baru. Hal ini menciptakan kesan militeristik dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mencegah perpecahan dan menjaga stabilitas nasional akibat isu konflik internal antara pendukung Sukarno dan Soeharto, pemerintah Orde Baru melakukan reorganisasi dalam tubuh ABRI.

d. Penyeragaman Ideologis

Penyeragaman ideologis pada masa Orde Baru dilakukan dengan mewajibkan ideologi Pancasila bagi seluruh warga negara, termasuk PNS, militer, mahasiswa, dan pelajar. Melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dikoordinasi oleh BP7, pemerintah bertujuan membentuk satu pemahaman tentang Demokrasi Pancasila guna menggalang dukungan opini publik terhadap pemerintahan. Selain itu, seluruh organisasi politik juga diwajibkan menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kegiatan mereka.

e. Pemberlakuan NKK/BKK

Pemerintah Orde Baru mengendalikan stabilitas politik di perguruan tinggi pasca-peristiwa Malari 1974 melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Kebijakan ini menuai pro dan kontra: di satu sisi dinilai mematikan partisipasi politik mahasiswa, namun di sisi lain dianggap membantu mahasiswa fokus pada kegiatan akademis. Kendati bertujuan meredam peran mahasiswa sebagai kontrol sosial, kebijakan NKK/BKK justru mendorong aksi mahasiswa menjadi lebih kritis.

2. Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Pemerintah Orde Baru juga berupaya mengembalikan politik luar negeri bebas aktif sesuai prinsipnya. Penerapan kembali politik bebas aktif bertujuan memulihkan stabilitas nasional dan mempercepat pembangunan. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan pemerintah Orde Baru ditunjukkan dengan:

- Mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia
- Kembali aktif dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 1966
- Turut menginisiasi berdirinya Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada 8 Agustus 1967 di Bangkok.

3. Rehabilitasi Ekonomi

Untuk mengatasi keterpurukan ekonomi warisan pemerintahan sebelumnya—seperti tingginya inflasi dan utang luar negeri—pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan rehabilitasi ekonomi guna melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, Presiden Soeharto membentuk tim penasihat ekonomi yang terdiri dari para ekonom Universitas Indonesia (Widjodjo Nitisastro, Emil Salim, Mohammad Sadli, Ali Wardhana, dan Soebroto) untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi nasional. Dari hasil pemikiran para ekonom UI tersebut, dirumuskan tiga usaha yang harus dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas ekonomi Indonesia:

a. Mengatasi Masalah Utang

   Presiden Soeharto mengatasi masalah utang luar negeri yang telah jatuh tempo melalui diplomasi ekonomi ke Prancis (*Paris Club*) dan Inggris (*London Club*). Langkah ini berhasil menjadwalkan ulang pembayaran utang Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memperoleh bantuan ekonomi dari negara-negara donor yang tergabung dalam *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) pimpinan Belanda.

b. Melakukan Kerja Sama dengan International Monetary Fund (IMF)**

   Pemerintah Orde Baru menjalin kerja sama dengan *International Monetary Fund* (IMF) untuk mendapatkan suntikan dana pembangunan sekaligus memulihkan kepercayaan investor asing. Sebagai anggota resmi IMF dan Bank Dunia, transaksi ekonomi Indonesia diakui secara internasional sehingga memungkinkan kegiatan impor berjalan, serta membuat Indonesia memperoleh bantuan dana sebesar US$174 miliar.

c. Membuka Kesempatan Berinvestasi di Indonesia

   Pemerintah Orde Baru mendorong rehabilitasi ekonomi melalui pembukaan investasi lewat UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) bagi investor luar negeri dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bagi investor domestik. Kebijakan PMDN ini memberikan fasilitas pembebasan pajak dan *tax holiday* bagi investor lokal yang memenuhi syarat kelayakan proyek.

Implementasi rehabilitasi ekonomi memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian negara. Kondisi perekonomian mulai membaik dan tingkat inflasi menurun. Langkah menciptakan stabilitas ekonomi negara disusul dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mulai diterapkan pada 1969. Sementara itu, penyelesaian masalah utang dan

kerja sama ekonomi menunjukkan pemerintah Orde Baru berupaya mengaktifkan kembali hubungan multilateral dengan negara-negara lain.

PENUGASAN DIKERJAKAN MAKSIMAL 23 OKTOBER 2026. KIRIM MELALUI WA

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip “Ekonomi sebagai Panglima” yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto!
2. Sebutkan dan jelaskan hasil dari kebijakan fusi (penggabungan) partai politik yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru!
3. Bagaimana pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) mengalami penyederhanaan jumlah peserta partai politik sejak tahun 1977 hingga masa akhir Orde Baru?
4. Jelaskan latar belakang dan dampak diterapkannya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) di perguruan tinggi!
5. Apa saja langkah-langkah strategis yang dirumuskan oleh tim penasihat ekonomi (ekonom UI) dalam melaksanakan kebijakan rehabilitasi ekonomi pada masa awal Orde Baru?